

# Economic Zones



ISSN: 2502 - 4841

EDISI AGUSTUS 2016 Volume 1 Nomor 2

Versi Online di <http://jurnal.hotnewsbatam.com>

Pengaruh Pemberitaan Terhadap Perkembangan Ekonomi di  
Kota Batam  
Hendri Kremer

Pengaruh Kepemimpinan Dan Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan  
PT Budi Jasa Batam  
Syaifulah

Permasalahan Dalam Standar Akuntansi Menuju Standar Akuntansi Internasional  
(IAS)  
Erni Yanti Natalia

Konsep Green Marketing dan Citra Merek Pengaruhnya Terhadap Intensitas  
Pembelian (Studi Pada Pengguna Pertamax Plus Ron 95 di SPBU Kota Batam)  
Putu Hari Kurniawan

Analisis Kontribusi Free Trade Zone (FTZ) Dan Transfer Pricing Pada Kawasan  
Ekonomi Khusus Batam  
Serli Diovani Teza

Tinjauan Tentang Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Derajat Otonomi Fiskal,  
Dana Alokasi Umum, Dan Indeks Kemampuan Rutin Keuangan Daerah Dalam  
Mendukung Otonomi Daerah (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat)  
Argo Putra Prima

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan  
Manajerial Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Pertambangan Yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013  
Dian Efriyenti

Influence Analysis Of Organizational Commitment, Work Discipline And  
Motivation On Employee Performance PT Cipta Tama Griya Prima In Batam  
Mohamad Gita Indrawan dan Wasiman

Pengaruh Leadership Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT  
Sumber Power Persada Electrical Ship Repair Dan Building  
Suhardi

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (P2MEA)**

**DEWAN REDAKSI**

- Diterbitkan Oleh : Yayasan Pendidikan dan Pelatihan  
Masyarakat Ekonomi Asean (P2MEA)
- Pelindung : Dewan Pembina Yayasan P2MEA
- Penasehat : Ketua Yayasan P2MEA
- Penanggung Jawab : Dr. M. Gita Indrawan, S.T., M.M.
- Ketua Penyunting : MHD. Fajri Nasution, S.E., M.M.
- Anggota Penyunting : Drs. I Wayan Catra Yasa, M.M., Dr. Candidate  
: Hazriyanto, S.E., M.M., Ph.D Candidate
- Ketua Redaksi Pelaksana : Ahmadin, S.E., M.M., M.SI., Dr. Candidate
- Anggota Redaksi : Yuliadi, S.Si., M.Ak.  
: Neni Marlina Br Purba, S.Pd., M.Ak.
- Editor : Hendri Kemer, S.E., M.Si.  
: Aman, S.pd.  
: Purwantoro, S.Sos.
- Layout dan Design : Heri Nuryanto, S.Kom., M.SI.
- Administrasi Umum : Reni Widia Astuti, S.SI.
- Alamat Redaksi : Town House Mediterania Blok KK 1 No. 03  
Kelurahan Baloi Permai Kota Batam Propinsi  
Kepulauan Riau
- Telephone : +62852-649-44449
- Handphone : +62852-649-44449
- Email : [yayasanp2mea@gmail.com](mailto:yayasanp2mea@gmail.com)

DAFTAR ISI

Pengaruh Pemberitaan Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kota Batam Hendri Kremer.....	1-24
Pengaruh Kepemimpinan Dan Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan PT Budi Jasa Batam Syaifullah.....	25-42
Permasalahan Dalam Standar Akuntansi Menuju Standar Akuntansi Internasional (IAS) Erni Yanti Natalia.....	43-61
Konsep Green Marketing dan Citra Merek Pengaruhnya Terhadap Intensitas Pembelian (Studi Pada Pengguna Pertamax Plus Ron 95 di SPBU Kota Batam) Putu Hari Kurniawan.....	62-76
Analisis Kontribusi Free Trade Zone (FTZ) Dan Transfer Pricing Pada Kawasan Ekonomi Khusus Batam Serli Diovani Teza.....	77-95
Tinjauan Tentang Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Derajat Otonomi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dan Indeks Kemampuan Rutin Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Argo Putra Prima.....	96-110
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periodc 2009-2013 Dian Efriyenti.....	111-135

Influence Analysis Of Organizational Commitment, Work Discipline  
And Motivation On Employee Performance PT. Cipta Tama Griya  
Prima In Batam

Mohamad Gita Indrawan dan Wasiman..... 136-160

Pengaruh Leadership Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  
Di PT Sumber Power Persada Electrical Ship Repair Dan Building  
Suhardi..... 161-187

**TINJAUAN TENTANG EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DERAJAT OTONOMI FISKAL, DANA ALOKASI UMUM, DAN INDEKS  
KEMAMPUAN RUTIN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG  
OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT)**

Argo Putra Prima

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Putera Batam

Email: argo\_putraprima@yahoo.co.id

*Abstrak .Dalam penelitian ini digunakan data dengan pengklasifikasian data anggaran dan realisasi pendapatan serta data anggaran dan realiasasi belanja yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagi hasil, dan bantuan. Kemudian dilakukan perhitungan kontribusi keuangan daerah terhadap otonomi daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari perhitungan tersebut dapat dinilai efektifitas rasio keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Derajat Otonomi Fiskal, Dana Alokasi Umum,dan Indeks Kemampuan Rutin) berdasarkan kategori keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima variabel terdiri dari tiga variabel yang dikategorikan efektif yaitu Derajat Otonomi Fiskal, Dana Alokasi Umum, dan Indeks Kemampuan Rutin karena ketiganya menunjukkan nilai yang tinggi setiap tahunnya menurut kategori keuangan daerah. Kemudian dua variabel yang tidak efektif yaitu tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang rendah setiap tahun dan Rasio Ketergantungan yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tinggi terhadap pusat.*

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Derajat Otonomi Fiskal, Dana Alokasi Umum, dan Indeks Kemampuan Rutin.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal adanya sistem sentralistik sebagaimana yang tersirat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Undang Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk itu skripsi ini mengambil judul "Tinjauan Tentang Efektifitas Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah".

### Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat bersifat fluktuatif dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang berpengaruh terhadap otonomi daerah.
2. Sistem otonomi daerah menjadikan bertambahnya kewenangan daerah dalam menutupi kebutuhan daerahnya yang merupakan beban yang harus dipikul pemerintah daerah tanpa ketergantungan sepenuhnya pada pemerintah pusat.
3. Rendahnya PAD Sumatera Barat dari tahun 2008 sampai dengan 2012 menjadi masalah pokok bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.
4. Masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
5. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi.

## Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memfokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang berkontribusi terhadap efektifitas pelaksanaan otonomi daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah?
2. Bagaimana efektifitas derajat otonomi fiskal terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah?
3. Bagaimana efektifitas rasio dana alokasi umum terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah?
4. Bagaimana efektifitas indeks kemampuan rutin terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas tingkat pertumbuhan PAD terhadap rasio keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas tingkat pertumbuhan PAD terhadap rasio keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas rasio dana alokasi umum terhadap rasio keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas indeks kemampuan rutin terhadap rasio keuangan daerah.

### Otonomi Daerah

Menurut Hadi Wiyono Isworo (2007:176) istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Otonomi daerah merupakan penceran keadaulatan rakyat, otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

### Keberhasilan Otonomi Daerah

Menurut Aswin Rizkiano (2011:63) untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### Keuangan Daerah

Menurut Rachmat (2007:315) ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah sebagai berikut :

1. Perencanaan keuangan daerah
2. Pelaksanaan keuangan daerah
3. Pertanggung jawaban keuangan daerah

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah. Dalam struktur APBD, komponen penerimaan daerah terdiri dari (sumber: laporan keuangan Provinsi Sumatera Barat):

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi.
4. Bagian pinjaman pemerintah daerah.

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan .
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah

Menurut Halim (2008:134) efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka berpikir

## Hipotesa

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah disusun penulis maka penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Diduga efektifitas tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi positif terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah.
2. Diduga efektifitas derajat otonomi fiskal berkontribusi positif terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah.
3. Diduga efektifitas rasio dana alokasi umum berkontribusi positif terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah.
4. Diduga efektifitas indeks kemampuan rutin berkontribusi positif terhadap keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung otonomi daerah.

## PEMBAHASAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat komplek Gor H.Agus Salim jalan Batang Asahan No.2 Kota Padang.

### Variabel Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
3. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
5. Rasio Keuangan Daerah

## Definisi Operasional

Dari variabel penelitian ini akan dapat sijelaskan mengenai defenisi operasional variabel penelitian yaitu :

1. Rasio Keuangan Daerah: Derajat kemandirian fiskal yang diproksi dari rasio antara PAD dengan Total Penerimaan APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang sama, dinyatakan dalam persen.
2. Tingkat Pertumbuhan PAD: Pertumbuhan pendapatan asli daerah diukur berdasarkan pendapatan asli daerah periode APBD dibagi dengan pendapatan asli daerah periode APBD sebelumnya, dinyatakan dalam persen.
3. Derajat Otonomi Fiskal: Derajat Otonomi Fiskal adalah Besar kecilnya kemampuan keuangan suatu daerah dalam memberikan suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah, dinyatakan dalam persen.
4. Rasio DAU: RDAU adalah Tingkat penyaluran dana yang harus di alokasikan pemerintah pusat kepada suatu daerah guna menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah, dinyatakan dalam persen.
5. Indeks Kemampuan Rutin: IKR adalah Suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin, dinyatakan dalam persen.

## Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder:

### 1. Sekunder

Yaitu data pendukung dalam menyelesaikan skripsi ini berupa studi kepustakaan untuk memperoleh sumber-sumber teori sebagai acuan dalam penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya :

1. Penelitian Perpustakaan
2. Penelitian Lapangan

### Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2006 : 169) Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kualitatif

Analisis Data Kualitatif adalah proses kegiatan yang meliputi mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan dan mensintesiskan data selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan dan memaparkan temuan-temuan hubungan dalam bentuk deskripsi naratif, bagan, flow dalam, matriks maupun gambar-gambar yang bisa dimengerti dan pahami oleh orang.

2. Penelitian Kuantitatif

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Barat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Widodo (2001 : 262) untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah:

1. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$TP PADt = \frac{PADt - PADt-1}{PADt-1} \times 100\%$$

2. Mengukur Derajat otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Sumatera Barat

$$DOF = \frac{PADt}{APBD} \times 100\%$$

3. Mengukur besarnya Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat

$$RDAU = \frac{DAU}{APBD} \times 100\%$$

4. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Provinsi Sumatera Barat untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan

$$IKR = \frac{PADt + DAU + Bagi Hasil}{Belanja Rutin} \times 100\%$$

5. Menghitung Rasio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{DAU + DAK + Batuan}{APBD} \times 100\%$$

### **Analisis Data dan Pembahasan**

Untuk menilai kinerja keuangan serta sebagai alat bantu, maka perlunya perbandingan realisasi dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

### **Interpretasi Efektifitas Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah**

Dari hasil perhitungan kontribusi keuangan daerah terhadap otonomi daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dapat dinilai efektifitasnya setiap tahun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah, derajat otonomi fiskal, dan indeks kemampuan rutin setiap tahun semakin baik untuk perkembangan otonomi daerah. Serta semakin rendah rasio dana alokasi umum dan rasio ketergantungan maka dapat dinilai sebuah daerah mampu membiayai kebutuhan otonomnya tanpa bergantung besar kepada

pusat. Oleh karena itu interpretasi efektifitas perkembangan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.3.6.2

## Interpretasi Efektifitas Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah

Keterangan	Tahun									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	%	Efektifitas	%	Efektifitas	%	Efektifitas	%	Efektifitas	%	Efektifitas
Pertumbuhan PAD	38,00	Sedang	6,41	Sangat kurang	36,15	Sedang	21,61	Cukup	0,09	Sangat kurang
DOF	45,83	Baik	36,49	Sedang	52,41	Sangat baik	56,06	Sangat baik	41,93	Baik
RDAU	19,01	Baik	19,29	Baik	15,57	Baik	17,38	Baik	15,06	Baik
IKR	92,19	Sangat baik	89,42	Sangat baik	79,35	Sangat baik	99,18	Sangat baik	78,83	Sangat baik
RK	42,14	Kurang	44,19	Kurang	35,06	cukup	39,48	Cukup	34,36	cukup

Berdasarkan tabel 4.3.6.2 diatas dapat dilihat efektifitas perkembangan kemampuan keuangan daerah dari perubahan pertumbuhan PAD, Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU), Indeks Kemampuan Rutim (IKR), Rasio Ketergantungan (RK) dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebagai berikut:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung turun, tahun 2008 sebesar 38,00 %, sedangkan tahun 2009 turun sebesar 31,59 %, tahun 2010 naik sebesar 29,74 %, tahun 2011 turun sebesar 14,54 %, dan tahun 2012 turun sebesar 21,52.
2. Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) cukup efektif dilihat dari tingginya persentase setiap tahun. Tahun 2008 sebesar 45,83 % mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan tahun 2009 sebesar 9,34 %, naik sebesar 15,92 % tahun 2010, naik sebesar 3,65 % tahun 2011, dan turun sebesar 14,13 % tahun 2012.
3. Efektifitas Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) memiliki persentase baik setiap tahun serta mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 19,01 % tahun 2008 naik sebesar 0,28 % tahun 2009, turun sebesar 3,92 % tahun 2010, naik sebesar 2,01 % tahun 2011 dan turun sebesar 2,32 % tahun 2012.

4. Efektifitas Indeks Kemampuan Rutin (IKR) memiliki persentase sangat baik setiap tahun akan tetapi cenderung turun yaitu 92,19 % tahun 2008, tahun 2009 turun sebesar 2,77 %, pada tahun 2010 turun sebesar 10,07 %, tahun 2011 naik sebesar 19,83 % dan turun sebesar 20,35 tahun 2012.
5. Dari keempat kesimpulan diatas yang menjelaskan lima variabel terdiri dari tiga variabel yang dikategorikan efektif yaitu Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) karena ketiganya menunjukkan nilai yang tinggi setiap tahunnya menurut kategori keuangan daerah. Kemudian dua variabel yang tidak efektif yaitu tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan karena pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang rendah setiap tahun dan Rasio Ketergantungan (RK) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tinggi terhadap pusat. Jadi perbandingan yang efektif dengan yang tidak efektif adalah 3:2, karena variabel yang efektif lebih banyak dari pada yang tidak efektif maka dapat disimpulkan efektifitas perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah adalah efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan pembahasan terhadap penelitian Efektifitas Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab tujuan dan manfaat penelitian serta pemecahan rumusan masalah yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari Efektifitas Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah adalah:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan penggabungan unit kerja yang sebelumnya terpisah-pisah, adapun organisasi yang bergabung dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Biro Keuangan Kantor Gubernur. Yang bertugas mengelola

seluruh pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih baik dan transparan.

2. Dari pengukuran efektifitas tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 kurang efektif karena setiap tahunnya cenderung turun dan mengalami kenaikan yang kurang signifikan.
3. Dari pengukuran efektifitas Derajat Otonomi Fiskal (DOF) tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 efektif karena setiap tahunnya cenderung naik.
4. Dari pengukuran efektifitas tingkat Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 efektif karena setiap tahunnya selalu baik .
5. Dari pengukuran efektifitas Indeks Kemampuan Rutin (IKR) tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 efektif karena setiap tahunnya selalu dengan persentase sangat baik.
6. Dari keempat kesimpulan diatas yang menjelaskan lima variabel terdiri dari tiga variabel yang dikategorikan efektif yaitu Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) karena ketiganya menunjukkan nilai yang tinggi setiap tahunnya menurut kategori keuangan daerah. Kemudian dua variabel yang tidak efektif yaitu tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan karena pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang rendah setiap tahun dan Rasio Ketergantungan (RK) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tinggi terhadap pusat. Jadi perbandingan yang efektif dengan yang tidak efektif adalah 3:2, karena variabel yang efektif lebih banyak dari pada yang tidak efektif maka dapat disimpulkan efektifitas perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah adalah efektif.

#### Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari peneliti yang memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Setelah mengetahui hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan beberapa saran:

1. Bagi pemerintah agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat demi tercapainya tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, baik peningkatan pendapatan dari sektor pajak maupun non pajak.
2. Pemerintah seharusnya lebih menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat terutama mikro ekonomi untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Provinsi Sumatera Barat, karena rendahnya pendapatan di Sumatera Barat dapat dilihat dari tingginya jumlah masyarakat yang merantau.
3. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan dan mendukung aspek yang mempengaruhi terhadap kemajuan otonomi daerah Provinsi Sumatera Barat seperti aspek keuangan dengan taat membayar pajak dan retribusi, turut serta dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, dan mendukung berbagai program pemerintah Provinsi Sumatera Barat demi tercapainya tujuan otonomi daerah.
4. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar :
  - a. Lebih memperluas sampel dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih maksimal.
  - b. Menggunakan variabel lainnya misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak, belanja rutin dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Ekonomi ASEAN (P2MEA)

- Darine, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta. Penerbit PT Indeks
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Husaini, Mohammed Al & Gowda, K Nanje. 2008. "The Conceptual Framework of Accrual Accounting as Applicable to Government ". University Journal Accounting Research, 8 (3)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepemendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Ratnawatin, Anny. 2009. *Reformasi Sistem Perencanaan Anggaran Indonesia. Mempertajam Efektifitas Kebijakan Pengeluaran Anggaran dalam Era Baru Kebijakan Fiskal*. PT Kompas Media Nusantara
- Sedarmayanti dan Syafrudin Hidayat. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit CV. Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Daerah  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Wolk, Harry L., Dodd, James L. dan John J. Rozycski. 2009. *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. Los Angeles :SAGE Publication

<http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/11/keuangan-daerah.html>, accesed 28 Oktober 2013